

ANALISIS PERAN DAN FUNGSI HUMAS PEMERINTAH DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI PADA SEKERTARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

Analysis of Government Public Relations Role and Function in Global Information Era at Legislative House Central Sulawesi Province

¹Mohammad Eka Fahri, ²Andi Alimuddin Unde

¹Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Hasanuddin Makassar. ekafahri@gmail.com

²Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Hasanuddin Makassar. undealimuddin@yahoo.co.id

ABSTRACT

The objective of this research is to know the Public Relations role and function also Threats in implementation of role and function in global information era at legislative house central Sulawesi province. There are five informants that interviewed. Data analyzed using Miles and Hubberman Model Data Analysis. The result of this research showed that Government public relations in DPRD roles as Communication Technician and Fasilitator. Government public relations in DPRD functioning as Documentation and Information. There are two variables that become threat in implementation of roles and functions that is Internal and External. Internal factors consist of four that is Less Budget, Less human resources, uneven work distribution and Less participation from Leader and Member of Legislative House. PR needs education, training and technical guidance in Public Relations in order to prepare PR staf facing threat regarding the implementation of his role and function.

Keywords: Role, Functions, Public Relations, Implementattion and Threat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran dan Fungsi Humas serta Tantangan dalam Implementasi Peran dan Fungsi tersebut di Era Keterbukaan Informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan dilaksanakan di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah. Informan yang diwawancarai berjumlah lima orang. Data dianalisis menggunakan Model Analisis Data Miles dan Hubberman. Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Humas Pemerintah pada Sekertariat DPRD provinsi Sulawesi Tengah Pemerintah berperan sebagai Teknisi Komunikasi dan Fasilitator Komunikasi. Humas Pemerintah Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan fungsi dokumentasi dan fungsi informasi. Variabel yang menjadi tantangan dalam implementasi peran dan fungsi ada dua yaitu Variabel Internal dan Variabel Eksternal. Variabel Internal ada empat yaitu Minimnya anggaran, Kurang tersedianya Sumber daya manusia, Pembagian tugas yang belum merata serta Partisipasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang masih minim. Guna menunjang Peran dan Fungsi yang baik dibutuhkan Pelatihan dan Bimbingan Teknis di bidang kehumasan agar pegawai humas siap menghadapi tantangan dalam implementasi peran dan fungsi humas.

Kata kunci : Peran, Fungsi, Hubungan Masyarakat, Implementasi, Tantangan

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2003 yaitu melalui Instruksi Presiden Nomor 3

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Instruksi ini diberikan kepada seluruh kementerian, lembaga pusat maupun daerah untuk melakukan persiapan pemanfaatan teknologi

dalam tata kelola pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Instruksi tersebut kemudian menjadi langkah awal pemerintah Indonesia untuk melakukan pembenahan dalam bidang keterbukaan informasi. Pemerintah yang dulunya bersifat satu arah dan otoriter kemudian berubah menjadi terbuka (Demokrasi) dan interaktif.

Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini menjadi awal perubahan sistem komunikasi humas pemerintah yang awalnya bersifat satu arah yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kemudian berubah menjadi dua arah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah sekaligus publiknya. Peran humas dalam sebuah organisasi adalah sebagai penyampai informasi dari organisasi tersebut kepada masyarakat. Semua informasi yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi harus dapat dikemas dan disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menerima informasi tersebut dengan baik.

Dewasa ini, humas menjadi sebuah bagian yang sangat penting dalam setiap organisasi. Fungsi humas dalam membangun citra yang positif dimata audiensnya dan membangun hubungan baik antara organisasi tersebut dengan masyarakatnya. Hal ini membuat humas menjadi sebuah bagian yang semakin dibutuhkan oleh setiap organisasi. Kehandalan humas dalam melaksanakan tugasnya terkadang menjadi sebuah akses untuk membangun citra organisasi tersebut. Selain untuk membangun citra positif humas juga berkewajiban mempertahankan citra positif organisasi tersebut.

Millet¹ menyatakan bahwa Humas memiliki beberapa tugas utama antara lain mempelajari keinginan publik, menciptakan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan pemerintah serta mencoba menciptakan citra baik pemerintah di mata publik. Untuk mewujudkan tugas ini maka

¹ Nilam Sari, B. W. 2012. *Humas Pemerintah*. Edisi Pertama. Jogjakarta: Graha Ilmu.

sudah sewajarnya Humas memanfaatkan segala jenis saluran. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dikesampingkan dalam implementasi tugas humas. Humas sebagai ujung tombak informasi pemerintah diharuskan dapat menjangkau seluruh masyarakat.

Saya melihat ada tiga kasus yang dihadapi oleh Humas sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kasus pertama adalah Tambang Dongi-Dongi di Kabupaten Donggala². Kedua adalah kasus Tanjungsari di Luwuk³, dan Ketiga adalah masalah kekosongan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang sudah berjalan hampir 2 tahun⁴. Berdasarkan pemaparan diatas penulis melihat bahwa masih diperlukan beberapa pembenahan dari aspek peran, tugas pokok dan fungsi mereka.

Permasalahan

1. Bagaimana Implementasi Peran dan Fungsi Humas di Era Keterbukaan Informasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Apa Tantangan yang dihadapi oleh Humas dalam Implementasi Peran dan Fungsinya di Era Keterbukaan Informasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah?

KAJIAN LITERATUR

Grunig (1989) menyatakan bahwa *Public Relations* adalah penggunaan komunikasi untuk memanipulasi publik demi kepentingan organisasi⁵. Cutlip-Centre-Broom (2006) mendefinisikan PR sebagai *the planned*

² <https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/dongi-dongi-di-tengah-ketiadaan-tanah-dan-perkara-tambang>.

³ <https://paluekspres.fajar.co.id/sejak-1977-begini-perjalanan-hukum-sengketa-lahan-pemukiman-warga-tanjung-sari/>

⁴

<https://sulteng.antaranews.com/berita/39791/proses-pemilihan-wagub-sulteng-terancam-dead-lock>

⁵ Rachmat Kriyantono. 2014. *Teori Public Relations* Perspektif Barat dan Lokal. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

*effort to influence opinion through good character and responsible performance, based on mutually satisfactory two-way communication*⁶. Dapat disimpulkan bahwa Public Relations adalah penggunaan komunikasi yang terencana untuk membujuk publik agar mendukung organisasi dengan asas komunikasi dua arah yang memuaskan.

Humas dalam mengimplementasikan Peran dan Fungsinya harus memperhatikan beberapa hal. Menurut Grunig, et al⁷ bahwa ada 10 premis yang harus dipenuhi yaitu Keterlibatan humas dalam aktifitas organisasi (*Involvement*), Penguatan humas dari stakeholder (*Empowerment*), Manajer *public relations* haruslah orang yang bercirikan ‘manajer komunikasi’ bukan ‘teknisi komunikasi’ (Manajerial), Fungsi humas sudah dilakukan oleh bidang humas (*Intergation*), Bidang humas sudah berdiri sendiri (*Independent*).

Humas juga harus memiliki pengetahuan yang menunjang tugasnya (*Knowledge*), menjalin relasi yang baik dengan publiknya (*Mixed Motives*), Anggota dapat memberikan masukan dalam mekanisme pengambilan keputusan (*Symmetrical Internal Communication*), Adanya diversitas peran dalam menjalankan fungsi *public relations* (*Role Diversity*) dan *public relations* harus mengutamakan kode etik dan integritas profesi (*Ethical*).

Humas dalam menganalisis tantangan menurut Smith (2005) perlu menganalisis tiga hal yaitu Situasi, Organisasi dan Publik⁸. Cancel, et al menyebutkan ada empat variabel yang sering menjadi tantangan dan dihadapi oleh Humas. Empat variabel tersebut adalah Internal yang berasal dari dalam organisasi, eksternal yang berasal dari luar organisasi,

Predisposing yaitu variabel yang muncul sebelum terjadinya interaksi dan Situasional yaitu variabel yang muncul setelah terjadi interaksi.

METODE

Lokasi dan Bahan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Studi Kasus dengan maksud untuk menganalisis peran dan fungsi humas pemerintah serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi peran dan fungsi humas pemerintah di era keterbukaan informasi pada humas sekertariat DPRD provinsi Sulawesi Tengah.

Informan penelitian ini berjumlah lima orang yaitu Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol serta Staf pelaksana yang sudah bertugas ±2 Tahun di Sub Bagian Humas dan Protokol. Pengumpulan data dan informasi diperoleh melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model analisis data Miles dan Hubberman. Model analisis data yang dilakukan adalah: (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Menampilkan data, (4) Pengambilan kesimpulan dan Verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok menjalankan urusan pemerintahan di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Otonomi Daerah dan Sub-Sub Bagian Pejabat Negara seperti Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh Seorang Sekretaris dengan dibantu oleh tiga kepala bagian dan enam kepala sub bagian serta Pegawai fungsional dan fungsional tertentu. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memiliki fungsi untuk memfasilitasi pedoman Tata Tertib DPRD, fasilitasi dan monitoring evaluasi terkait Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

⁶ Cutlip, S. M., Center, A. H Dan Broom, G. M. 2006. *Effective Public Relations*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Offset.

⁷ Rachmat Kriyantono. 2014. *Teori Public Relations* Perspektif Barat dan Lokal. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

⁸ Smith, R. D. 2005. *Strategic Planning for Public Relations*. Edisi Pertama.

Peraturan gubernur nomor 52 tahun 2016 menyebutkan bahwa Sub bagian humas dan protocol berada di bawah bagian persidangan. Tugas pokok bagian persidangan adalah melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang persidangan, risalah, alat kelengkapan, hubungan masyarakat dan protokol. Sub bagian humas dan protocol adalah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang humas dan protokol.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua informan yang diwawancarai memahami peran dan fungsi humas. Pak Arsy mengatakan bahwa tugas humas adalah Merekap kegiatan yang dilakukan oleh DPRD, yang kemudian akan dipublikasikan melalui mitra kami yaitu media massa yang meliputi media cetak maupun media elektronik.

Senada dengan hal tersebut Pak Irham juga mengatakan bahwa selama ini ada tiga tugas yang dilakukan beliau lakukan sehari-hari. Tugas yang dilakukan adalah Kegiatan yang pertama mencatat media cetak yang masuk dan mendistribusikan pada pimpinan dewan, komisi – komisi dan sekwan. Yang kedua menghubungi media cetak dan elektronik untuk meliput kegiatan sidang paripurna dan sidang – sidang lainnya. Yang ketiga yaitu memediasi pertemuan pendemo dengan anggota DPRD.

Dalam implementasi tugas sehari-hari ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Humas sekretariat DPRD. Menurut Pak Rendra untuk memfasilitasi pengajuan aspirasi dari masyarakat sebenarnya kami memiliki kendala, jika kami sudah menyurat kepada anggota dewan atau komisi tertentu, mereka tidak merespon dan saling melimpahkan tugas, dan tidak bisa menerima pendemo. Dengan alasan diluar kota atau dalam perjalanan dan lain sebagainya. Hal tersebut juga disetujui

oleh Ibu masyithah. Hal ini berdampak pada implementasi peran dan fungsi humas yang tidak maksimal.

PEMBAHASAN

a. Implementasi Peran dan Fungsi

Humas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan saya melihat bahwa Humas sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran sebagai Humas External dan Internal. Maknanya bahwa tugas Humas adalah menyambungkan antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Media dan Masyarakat.

Cutlip, Centre, dan Broom (2006) menyatakan bahwa ada empat Peran dari Humas yaitu Humas sebagai Teknisi Komunikasi, Humas sebagai Fasilitator Komunikasi, Humas sebagai Pemecah Masalah maupun Humas sebagai *Expert Prescriber*. Dalam penelitian saya baik wawancara, observasi maupun olah data sekunder saya menyimpulkan bahwa peran Humas Pemerintah di Sekretariat DPRD masih berperan sebagai Teknisi Komunikasi.

Hal ini ditunjukkan dengan implementasi tugas mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi publikasi seperti melakukan pemberitaan di media-media internal maupun eksternal. Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah juga menjalankan peran sebagai Fasilitator Komunikasi. Hal ini ditunjukkan dengan implementasi tugas mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi fasilitator dalam menghubungkan antara masyarakat dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Fungsi Humas yang dijabarkan oleh Rosady Ruslan (2007) bahwa Humas hanya memiliki fungsi dokumentasi dan kliping berdasarkan penelitian ini saya rasa kurang tepat. Fungsi humas saat ini memang masih menjalankan fungsi dokumentasi namun sudah tidak menjadikan fungsi kliping sebagai fungsi utama. Studi saya menemukan bahwa Humas

Sekretariat DPRD lebih banyak berfungsi dalam melayani dan memfasilitasi hubungan antara DPRD dengan Masyarakatnya secara nyata. Mereka terlibat dalam proses Unjuk Rasa dan sebagai jembatan yang mempertemukan Pengunjuk rasa dengan Anggota DPRD yang dapat membantu masalah mereka.

Humas juga menjalankan fungsi Sumber Informasi bagi DPRD dengan memfasilitasi mengundang Media untuk meyebarluaskan kegiatan DPRD secara masal dan memberitakan proses tentang isu tertentu menggunakan media internal seperti Majalah, Buletin maupun Website DPRD. Guna menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi Humas bekerjasama dengan Media eksternal seperti Radar sulteng, Mercusuar, Media Al-Khairat, Metro Sulawesi dan Sulteng Raya. Humas juga bekerjasama dengan media elektronik seperti TVRI dan Palu TV. Humas juga memiliki saluran internal Sekretariat DPRD yaitu Buletin, Majalah dan Website.

Mengenai media yang sudah bekerjasama dengan DPRD Pak Arsy tidak menyebutkan tentang Media Sosial yang dimiliki oleh DPRD. Terkait hal tersebut saya mencoba melakukan *Follow Up* terkait hal tersebut. Namun, beliau mengungkapkan bahwa sepengetahuan beliau Sekretariat DPRD belum memiliki media social. Namun saat saya berusaha mengkonfirmasi hal tersebut dan berselancar di dunia maya saya menemukan bahwa terdapat beberapa Akun Pribadi yang menggunakan nama Sekretariat DPRD, Akun Twitter Sekretariat DPRD serta Instagram dengan nama Sekretariat DPRD. Saat saya konfrontasi beliau tidak mengetahui hal tersebut.

Hal ini perlu menjadi perhatian dari Sub bagian humas karena hal ini dapat berdampak kepada citra lembaga itu sendiri jika ada yang menyalahgunakan. Sehingga jika saya bisa memberikan jalan keluar perlu untuk Sekretariat DPRD membuat akun resmi dan melaporkan akun-akun yang ‘palsu’ tersebut untuk di hapus. Secara umum saya melihat

bahwa Humas dilibatkan (*Involvement*) dalam setiap kegiatan besar DPRD seperti Reses, Rapat Internal, Eksternal maupun Paripurna. Website ini merupakan sebuah upaya penguatan (*Empowerment*) Sub bagian humas karena Website ini baru saja diadakan dan belum di launching.

Tugas Pokok dan Fungsi yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Sekretariat DPRD. Hal ini merubah Humas yang awalnya hanya tugas perbantuan pada Sub bagian Informasi dan Publikasi menjadi sebuah organisasi yang berdiri sendiri (*Integration dan Independent*). Sub bagian Humas dan Protokol dikepalai oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab Kepada Kepala Bagian dan Sekertaris DPRD serta Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol dibantu oleh Tenaga Fungsional Khusus maupun Umum (*Managerial*).

Informasi yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD melalui media yang sudah bekerja sama maupun media internal DPRD harus mendapat persetujuan pimpinan (*Two Way Asymmetrical Model*). Staf dapat mengusulkan suatu kegiatan atau program melalui Kepala Sub bagian yang akan membahas dengan pimpinan apakah kegiatan tersebut dapat dimasukan kedalam kegiatan Tahun berjalan atau Tahun depan (*Symmetrical Internal Communication*). Guna menjalankan peran dan fungsinya Staf sub bagian humas perlu untuk diberikan pelatihan yang memadai dalam menunjang pekerjaan mereka (*Knowledge*). Staf sub bagian humas dan protocol menjunjung erat Panca Prasetya Korpri dan Pergub No. 52 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Sekretariat DPRD sebagai pedoman kerja mereka (*Ethical*).

b. Tantangan

Menghubungkan antara kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan Anggota DPRD menjadi sebuah kendala yang dihadapi oleh Humas DPRD. Secara kompak staf yang saya wawancarai mengungkapkan hal yang sama

terkait penanganan unjuk rasa di Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Staf sekertariat DPRD setuju bahwa menghubungi Anggota DPRD terkait unjuk rasa sulit untuk terjadi.

Masalah anggaran menurut saya adalah masalah umum yang dihadapi oleh semua instansi pemerintah. Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa anggaran tidak akan pernah cukup untuk digunakan setiap tahunnya. Menurut saya yang menjadi masalah utama adalah pengelolaan anggaran yang kurang efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran harus berdasarkan prinsip prioritas yang dapat dikembangkan menjadi sebuah program yang dapat dipertanggung jawabkan.

Keterbatasan dana tersebut juga menjadi alasan utama tidak diteruskan kerjasama dengan RRI. Selain itu, masalah anggaran ini juga berkaitan dengan tantangan kedua yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi saya menemukan bahwa hanya Pak irham, Ibu Nelly dan Ibu Masyithah yang pernah mengikuti pelatihan kehumasan dengan jurnalis pada tahun 2015 di Hotel Grand Duta dan Pelatihan protokoler di Jakarta. Staf humas lainnya seperti Pak Rendra belum diikutkan pada Bimbingan Teknis maupun Pendidikan dan Pelatihan terkait Humas.

Sumber Daya Manusia DPRD yang masih saya anggap kurang. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya Bimbingan teknis dan Pelatihan yang dilakukan oleh Humas Sekertariat DPRD. Terbukti bahwa hal ini menyebabkan pembagian tugas pada Sub Bagian Humas dan Protokol menjadi tidak seimbang.

Variabel eksternal yang saya analisis berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang berasal dari luar sekertariat DPRD. Kerjasama yang baik antara Humas dan DPRD sangat terlihat bahkan keputusan saat itu langsung dibuatkan pansus untuk meninjau lokasi konflik. Humas dalam menjalankan peran dan fungsinya dengan tanggap mengundang semua Media yang bekerjasama ataupun tidak untuk meliput mediasi yang dilakukan DPRD dengan Eksekutif. Sehingga informasi tersebut diharapkan dapat tersebar dengan baik. Namun saya juga menemukan

kendala dalam memberikan informasi yang *update* terkait pembentukan pansus maupun tinjauan lokasi konflik. Hal ini disebabkan Humas belum memiliki Media Sosial sebagai sarana penghubung antara DPRD dengan masyarakat.

Variabel Predisposing adalah variabel yang terjadi sebelum terjadi interaksi antara organisasi dengan masyarakat. Pemahaman saya terkait variabel predisposing adalah pemahaman tentang Tugas Pokok dan Fungsi terkait Tata Kerja Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Humas DPRD wajib untuk memahami peran dan fungsinya agar tidak terjadi masalah dalam implementasinya.

KESIMPULAN

Humas Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan Perannya sebagai Teknisi dan Fasilitator Komunikasi DPRD antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Media dan Masyarakat. Fungsi yang dilakukan oleh Humas Sekertariat DPRD adalah Fungsi Informasi dan Publikasi mengenai kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang direncanakan dan dapat memberikan citra positif bagi mereka. sesuai dengan teori *PR Excellence* bahwa Humas telah dilibatkan dalam setiap kegiatan DPRD (Involvement), diperkuat dengan Saluran yang beragam (Empowerment), menerapkan model komunikasi *asymmetris* (Motive), koordinasi antar bagian dan intra bagian berjalan baik (Internal Communication) serta menjunjung tinggi etika kehumasan dan kepegawaian (Ethical).

Dalam implementasi Peran dan Fungsi Humas Sekertariat DPRD belum dapat bersifat Independen karena Humas masih bersandar pada anggaran Sekertariat dan Pegawai Humas adalah ASN Daerah dan Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol belum mendapatkan pelatihan kehumasan (Independen, Integrasi dan Managerial). Implementasi tugas sehari-hari bertumpu pada dua Staf sehingga tugas tidak terlaksana dengan maksimal (Role

Diversity). Staf sub bagian humas yang baru ditempatkan belum mendapatkan pelatihan sehingga mereka masih belum bisa membantu secara aktif pelaksanaan tugas Humas DPRD (Knowledge). Sesuai dengan teori Cancel et, al memiliki empat masalah utama yaitu Variabel Internal yaitu Kurangnya Anggaran, Kurangnya Sumber Daya Manusia, Pembagian Tugas yang belum merata serta Partisipasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang minim pada saat ada aksi Unjuk Rasa, Variabel Eksternal Tekanan Masyarakat dan Mitra, Variabel Predisposing yaitu Kesadaran Humas itu sendiri serta Variabel Situasional yaitu Penerapan etika kehumasan dan etika Pegawai Negeri Sipil.

DAFTAR PUSTAKA.

- Aqli, Z. 2013. Peran Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam Mensosialisasikan Bahaya Banjir Di Kota Samarinda. *Diunduh pada 15 Desember 2017. Available from: [http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/Jurnal%200902055153%20\(11-29-13-02-41-26\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/Jurnal%200902055153%20(11-29-13-02-41-26).pdf)*
- Aras, M. 2014. Kegiatan *Government Public Relation* Dalam Membangun Komunikasi Dengan Dunia Pers: Studi Kasus Humas Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. *Diunduh pada 15 Desember 2017. Available from: http://research-dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/Proceeding/Humana/Vol%205%20no%202%20Oktober%202014/52_MCM_Muhammad%20Aras.pdf*
- Auerbach, C. F. & Silverstein, L. B. 2003. *Qualitative Data An Introducing to Coding and Analysis*. Edisi Pertama. New York: New York University Press.
- Bakrie., Unde, A. A., Bahfiarti, T. 2015. *Media Centre Sebagai Pusat Pelayanan Informasi Publik Dalam Penyebarluasan Aktivitas Pemerintahan Kepada Masyarakat Di Kabupaten*
- Pinrang*. Jurnal Komunikasi KAREBA Vol:4 No.2 April-Juni 2015. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Biddle, B. J. 1986. Development of Role Theory. *Diunduh 14 Desember 2017. Available from: <http://www2.ece.ohio-state.edu/~passino/RoleTheory-Biddle-1986.pdf>*
- Cangara, H. 2016. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Edisi Keenambelas. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Cutlip, S. M., Center, A. H Dan Broom, G. M. 2006. *Effective Public Relations*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Offset.
- Darwis, et, al. 2007. *Apa, Siapa, dan Kiprah Wakil Rakyat di Kancah Politik Sulawesi Tengah Hasil Pemilu 2004-2009*. Tiara Wacana: Jogjakarta.
- Daymon, C Dan Holloway, I. 2002. *Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communication*. Edisi Pertama. New York: Routledge.
- Gathmyr, R dan Hidayatsyah, A. 2012. Communicating Political Messages via Twitter : A Study on the Governatorial Election of Jakarta in 2012. Presented at The National Institute of Adminsitration Development (NIDA). Bangkok. Thailand.
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Penerapan e-Government.
- Juariyah. 2016. Tantangan Humas Pemerintah (Government Public Relations) menghadapi Web 2.0. Dalam: Cahyono HB et al. e-Proceeding International Seminar on Good Governance in The Policy Implementation Process and Public Communication. 2016 Mar 30; Jember, Jawa Tengah. Indonesia. p. 60
- Kriyantono, R. 2014. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Edisi Ketujuh. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

- Kriyantono, R. 2014. *Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Lewis, P. V. 1980. *Organizational Communication*. Edisi Kedua. Ohio: Grid Publishing, INC
- Littlejohn, S. W. Dan Foss, K. A. 2012. *Teori Komunikasi*. Edisi Kesembilan. Jakarta: PT. Salemba Humanika.
- Mulyana, D. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Edisi Ketigabelas. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nadjamuddin, L, et. al. 2011. *Sulawesi Tengah: Dinamika Parlemen dan Biografi Anggota DPRD Periode 2009-2014*. Intigrafika Sukses Mulia: Surabaya.
- Nilam Sari, B. W. 2012. *Humas Pemerintah*. Edisi Pertama. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Oliver, S. 2001. *Strategi Public Relations*. Edisi Pertama. Surabaya: PT. Gelora Aksara Pratama
- Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Pendaya gunaan Aparatur Sipil Negara tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya
- Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Evaluasi Perangkat Daerah Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
- Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 6 Tahun 2014 tentang *Pranata Humas*
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 30 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan pada Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 31 Tahun 2011 tentang *Infrastruktur Penunjang Tugas Humas Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 8 Tahun 2007 tentang *Pedoman Humas Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Ruslan, R. 2007. *Etika Kehumasan, Konsep & Aplikasi*. Edisi Pertama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Smith, R. D. 2005. *Strategic Planning for Public Relations*. Edisi Pertama.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Tench, R. Dan Yeomans, L. 2006. *Exploring Public Relations*. Edisi Pertama. Essex: Pearson Education Limited.
- Tim Penyusun Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. 2013. *Pedoman Penulisan Artikel Jurnal Ilmiah*. Cetakan Kedua. Makassar.
- Tim Penyusun Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. 2014. *Memori DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bhakti 2009-2014*. Palu.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Unde, A. A. 2014. *Televisi & Masyarakat Pluralistik*. Edisi Pertama. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Weddington, S. 2016. Excellence Theory in an Era of Digital Communication. Diunduh pada 15 Desember 2017. Available from:
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://wadds.co.uk/wp-content/uploads/2013/06/chartered-practitioner-paper-FINAL.pdf>

West, R. Dan Turner, L. H. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Salemba Humanika.

Widiastuty, W dan Kelana, AA, 2015. *Profil Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah*. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.

Wood, J. T. 2011. *Communication Mossaics*. Edisi Ketiga. Boston: Cengage Learning.

Situs Berita Online dan Internet

<http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta>. (Diakses Pada 17 Februari 2018)

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:26N46U8wrfwJ:https://radar.sultengonline.com/2018/07/04/alimudin>

[-tim-advance-cawagub-sulteng-tetap-bekerja/+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id](#) (Diakses Pada 5 Juli 2018)

www.bappeda.sultengprov.go.id (Diakses pada 11 Juli 2018)

www.Sulteng.Go.Id (Diakses pada 11 Juli 2018)

www.drpd.sulteng.com (Diakses pada 12 Juli 2018)

<https://www.sultengnews.com/dprd-sulteng-bentuk-pansus-selidiki-kerusuhan-eksekusi-lahan-di-tanjung-sari-luwuk/> (Diakses pada 13 Juli 2018)

<https://sulteng.antaranews.com/berita/39791/proses-pemilihan-wagub-sulteng-terancam-dead-lock> (Diakses pada 13 Juli 2018)

<https://paluekspres.fajar.co.id/pemilihan-cawagub-sulteng-kembali-dari-awal-lagi/> (Diakses pada 13 Juli 2018)

<https://paluekspres.fajar.co.id/mendagri-larang-dprd-voting-wagub/> (Diakses pada 13 Juli 2018)

<https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/dongi-dongi-di-tengah-ketiadaan-tanah-dan-perkara-tambang>. (Diakses pada 13 Juli 2018)

<https://paluekspres.fajar.co.id/sejak-1977-begini-perjalanan-hukum-sengketa-lahan-pemukiman-warga-tanjung-sari/> (Diakses pada 13 Juli 2018)